

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai sumber daya alam yang cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari sektor mata pencaharian masyarakat Bangka Belitung yang beranekaragam. Mata pencaharian masyarakat umumnya diperoleh melalui pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang tidak pernah habis dikelola dikarenakan selalu mengalami proses pembauran ulang contohnya ialah tumbuhan, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika digunakan terus menerus contohnya ialah timah.

Dalam kurun waktu yang cukup lama, timah menjadi komoditas yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat lokal. Peran pemerintah pusat dalam memproteksi kekayaan timah begitu kuat sehingga menggunakan kekuatan militer untuk menjaga sumber daya alam berupa timah agar tidak di eksploitasi oleh masyarakat lokal. Masyarakat lokal dilarang untuk menambang, menjual, serta menyimpan timah walaupun dalam jumlah yang kecil. Pada tahun 1998 perubahan besar pun terjadi terkait dengan eksploitasi timah secara bebas. Pemerintah pusat tidak lagi menempatkannya sebagai komoditas yang seharusnya diatur oleh pihak

pemerintah. Kondisi ini menjadikan awal mula munculnya penambangan timah secara bebas oleh masyarakat lokal.

Penggalian timah dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu menggunakan jalur darat dan apung. Pengambilan timah melalui jalur darat biasanya dengan menggali tanah yang mengandung biji timah, sedangkan pengambilan timah melalui jalur apung menggunakan ponton yang berfungsi sebagai wahana untuk menyimpan bahan bakar solar dan air tawar serta meletakkan alat isap biji timah ke tempat penampungan. Selain itu jumlah timah yang didapatkan sesuai dengan cara pengelolaannya.

Ponton Isap Produksi (PIP) sendiri merupakan salah satu bagian dari proses penambangan timah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Sistem PIP sendiri tidak jauh berbeda dengan sistem penambangan timah pada umumnya. Ponton atau alat apung merupakan bagian dari kumpulan beberapa tangki yang membentuk suatu badan kapal. Ponton isap produksi ialah media untuk menampung timah yang di dapatkan dari dasar laut ke tempat penampungan. Muatan timah yang dapat di tampung PIP dapat mencapai beberapa ton. Hal ini tentu akan mengeksploitasi timah secara besar – besaran. Status pengelolaan atau pemberian izin beroperasinya PIP dalam mengeksploitasi timah harus diperhatikan oleh pihak desa maupun Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang terlibat. Pihak yang terlibat didalamnya tentu mempunyai kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Kepentingan ini tentu didasari atas pertimbangan untung rugi dalam pemberian izin beroperasinya PIP. Namun, dalam konteks ini dengan adanya PIP tidak mendapat persetujuan dari kalangan masyarakat sekitar

sehingga menimbulkan gerakan penolakan masyarakat. Hal ini di latar belakang oleh kekhawatiran akan berpengaruh terhadap rusaknya sumber daya alam dan menimbulkan gerakan masyarakat peduli terhadap lingkungan.

Menurut Aditjonoro (2003: 75) lahirnya gerakan lingkungan masyarakat pada tahun 1966 berkaitan dengan pergantian rezim peralihan kekuasaan Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto. Gerakan ini bermula pada aksi mahasiswa yang mendatangi Menteri Kehutanan Hasyrul Harahap menolak konservasi tambak udang dikarenakan harus mementingkan kepentingan para petani agar tidak kehilangan mata pencaharian. Menurut Singh (2010: 12) gerakan – gerakan tidaklah diciptakan, apalagi diluncurkan atau dipimpin oleh para pemimpin. Apabila ada kesempatan ataupun munculnya ketidakpuasan yang di rasakan oleh masyarakat melewati batas kewajaran maka akan menimbulkan gerakan sosial. Artinya bahwa gerakan sosial ialah suatu bentuk protes atau tindakan masyarakat yang berhubungan dengan aksi penuntutan suatu kebijakan. Kebijakan dalam hal ini ialah kebijakan yang dibuat berimplikasi pada kerugian masyarakat. Gerakan protes juga dapat dilalukan dengan karya puisi berisikan kritikan perubahan sosial dalam ruang lingkup masyarakat.

Gerakan sosial seringkali menggunakan pendekatan dan memandang perilaku kelompok dengan tindakan menentang kebijakan negara yang dinilai tidak sesuai diterapkan di masyarakat. Hal ini membuat masyarakat mengerti dengan adanya kebijakan baru akan merugikan ataupun menguntungkan masyarakat pada kondisi yang terjadi.

Kondisi yang terjadi ialah terkait dengan adanya PIP di lingkungan Desa Belo Laut menimbulkan kerugian yang dialami oleh masyarakat sehingga membuat terjadinya gerakan sosial. Senada dengan kerugian yang dialami masyarakat, pemberian izin oleh pemerintah setempat memicu terjadinya gerakan sosial dikarenakan ketidaksesuaian dengan situasi lingkungan sekitar. Gerakan sosial sendiri tidak terlepas dari adanya mobilisasi sumber daya yang ada di masyarakat. Mobilisasi sumber daya ialah upaya yang memastikan tercukupinya sumber daya organisasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan keberlanjutan pencapaian visi dan misi organisasi. Sumber daya dalam hal ini ialah pemanfaatan potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang merupakan aktor dalam melakukan gerakan sosial. Korelasi antara gerakan dan mobilisasi sumber daya mempunyai peranan yang saling menguatkan demi tercapainya keberhasilan dalam melakukan gerakan sosial.

Konteks penelitian ini ialah pola gerakan sosial penolakan pada PIP di Desa Belo Laut Kabupaten Bangka Barat. Polemik PIP dan telah beroperasi di perairan kawasan pantai Belo Laut menjadi permasalahan pada masyarakat setempat. Beroperasinya PIP membuat masyarakat geram akan keberadaannya dan menimbulkan keresahan. Mengapa hal ini bisa terjadi pada kondisi lingkungan masyarakat Desa Belo Laut, tentu dalam hal ini masyarakat sekitar ingin memperoleh kejelasan terkait status PIP yang telah beroperasi di perairan pantai masyarakat setempat.

Keberadaan PIP mendapat tanggapan yang serius dari masyarakat lokal, membuat mereka bertanya pihak manakah yang sebetulnya berperan dalam memberikan perizinan beroperasinya PIP. Seharusnya PIP tidak mendapatkan perizinan untuk beroperasi mengeksploitasi timah di perairan pantai di Desa Belo Laut. Senyatanya, kondisi yang terjadi dilapangan PIP telah beroperasi di perairan pantai setempat membuat permasalahan yang serius dikalangan masyarakat. Bentuk protes telah dilakukan oleh masyarakat sekitar seperti aksi pemblokiran jalan untuk menolak segala bentuk aktivitas penambangan di perairan pantai sekitar. Oleh karena itu peneliti ingin melihat pola gerakan penolakan PIP di Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan melihat adanya gerakan penolakan masyarakat terhadap PIP, sehingga dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola gerakan penolakan PIP di Desa Belo Laut?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pola gerakan penolakan PIP di Desa Belo Laut?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pola gerakan penolakan PIP di Desa Belo Laut.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pola gerakan penolakan PIP di Desa Belo Laut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai kontribusi bagi pihak-pihak antara lain :

1. Manfaat secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana studi yang berkaitan dengan gerakan sosial dan bisa mengkaji atau melihat permasalahan gerakan penolakan ponton isap produksi.

2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan pengeksploitasi timah menggunakan PIP yang akan berdampak bagi masyarakat.
- b. Memberikan masukan bagi pemerintah terkait pertimbangan untuk dikaji sebelum mengambil kebijakan berhubungan dengan keberlanjutan ekosistem laut yang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat kedepannya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya untuk membantu peneliti dalam mengkaji permasalahan yang akan dilakukan. Penelitian *pertama* oleh Ade Setiawan (2012) dalam skripsinya yang berjudul “*Gerakan Serikat Buruh: Gerakan Penolakan/ Penuntutan Revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011 Oleh Serikat Buruh Di Kabupaten Gresik* “. Penelitian ini membahas gerakan dari serikat buruh yang ada di Kabupaten Gresik dalam menolak revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011. Hal ini di latarbelakangi

mengenai penuntutan hak-hak normatif mengenai jaminan keselamatan kerja dan upah para pegawai. Permasalahan yang terjadi juga disebabkan oleh ketidakcocokan buruh dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat perusahaan yang tidak mengikut sertakan buruh dalam pengambilan keputusan. Kebijakan ini terkesan terlalu menekan buruh. Dalam kasus ini tidak mengelakkan permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan selalu mengandung dimensi ekonomis, sosial kesejahteraan, dan sosial-politik. Pembangunan ketenagakerjaan juga berhubungan dengan penyediaan tenaga ahli dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dilema yang dirasakan lainnya, bahwa tidak selalu pabrik akan menggunakan jasa pekerja/buruh secara terus menerus. Permintaan tenaga kerja buruh untuk kebutuhan produksi menyesuaikan dengan jumlah permintaan pasar.

Penelitian Ade ini menggunakan teori mobilisasi. Penggunaan teori mobilisasi digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai gerakan serikat buruh dalam penolakan Ranperda Ketenagakerjaan 2011, dimana pada tahun 2010 DPRD Kabupaten Gresik komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat mulai melakukan pembahasan tentang Ranperda ini.

Permasalahan lainnya buruh keberatan dengan isi Ranperda tersebut. Bagi mereka isi dari Ranperda Ketenagakerjaan 2011 ternyata tidak lebih baik dari UU No 13 Tahun 2003. Peraturan ini tidak mengatur secara rinci tentang *outsourcing* dan sangat merugikan buruh. Serikat buruh juga keberatan karena pada pembahasan Ranperda tersebut dewan komisi D tidak mengikutsertakan partisipasi mereka. Secara tiba-tiba disahkan oleh pansus pada rapat paripurna

bulan juni tahun 2011 yang disetujui oleh Bupati Gresik, tapi dinilai sepihak tanpa melibatkan buruh. Pengesahan Ranperda sendiri mendapat tanggapan serius dari berbagai serikat buruh di Gresik, sehingga timbullah pengondisian dan memicu gerakan serikat buruh yang menolak revisi Ranperda Ketenagakerjaan 2011. Tindakan yang dilakukan seperti demonstrasi dengan sasaran DPRD Kabupaten Gresik yang berada di pusat kota. Gerakan menolak Ranperda Ketenagakerjaan diprakarsai oleh Konfederasi-SPSI dan DPC Sarbumusi. Kedua lembaga ini merupakan aktor utama dalam melakukan gerakan. Sebab sebagai inisiator utama yang mengkondisikan tindakan kolektif berupa demonstrasi untuk menolak Ranperda Ketenagakerjaan 2011.

Penelitian *kedua* dilakukan oleh Abdul Khalid (2013) dalam skripsi yang berjudul “*Pengaruh Kegagalan Reformasi Terhadap Pergolakan Gerakan Mahasiswa (Studi Atas Penolakan Rencana Kenaikan BBM di DIY)*”. Penelitian ini bermula pada rencana kenaikan BBM yang terjadi di Daerah Istimewa Jakarta. Gerakan BBM bermula dari timbulnya masalah-masalah kebangsaan dan politik nasional di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode dinilai tidak menunjukkan kinerja yang membanggakan, khususnya dalam megawal agenda penting reformasi seperti bidang korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.

Beberapa minggu menjelang rencana kenaikan harga BBM pada 1 April 2012, aksi mahasiswa menampakkan eskalasi yang luar biasa. Hampir setiap hari berlangsung demonstrasi dari elemen mahasiswa. Potret radikal gerakan mahasiswa dalam kasus penolakan kenaikan harga BBM tahun 2012 bisa dilihat

dari pilihan model aksi yang di tampilkan dilapangan dengan berkonfrontasi langsung dengan kekuatan militer yang tidak jarang berakhir dengan bentrok.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi dengan menggunakan teori gerakan sosial milik Rajendra Singh. Dalam masalah ini terdapat bentuk gerakan atau aksi mahasiswa yang menolak rencana kenaikan BBM yang berimplikasi kepada masyarakat kelas bawah. Penelitian ini melihat bahwa adanya bentuk perlawanan atau gerakan yang terjadi dari kalangan mahasiswa yang menolak akan kebijakan rencana pemerintah. Hal ini di dasari atas dampak yang di timbulkan dan dirasakan oleh masyarakat.

Hasil dari penelitian ini yaitu aksi mahasiswa yang berkomitmen untuk memperjuangkan tuntutan yang bermaklud dalam isu-isu perjuangan aksi sepanjang aksi penolakan BBM. Sejatinya, gerakan ini berisi ungkapan untuk perbaikan nasional. Dengan aksi jalannya mahasiswa berusaha menyadarkan publik bahwa kebijakan pemerintah harus melihat dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Apabila kebijakan yang dibuat merugikan maka akan menimbulkan pertentangan dikalangan masyarakat yang merasa dirugikan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh oleh Ahmad Sufyan (2012) dalam jurnal yang berjudul “ *Gerakan Sosial Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara Melawan Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang* “. Jurnal ini menjelaskan gerakan sosial masyarakat Pegunungan Keng Utara didasari atas kondisi sosial masyarakat yang berada dalam situasi *structural staint*. Kondisi seperti itu atas dasar kecemburuan sosial dikarenakan adanya dukungan dari kalangan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Gerakan sosial masyarakat

pegunungan Kendeng Utara merupakan gerakan sosial yang bersifat sparatis. Gerakan tersebut mencerminkan usaha masyarakat sipil yang melawan kekuatan pemilik modal. Gerakan sosial masyarakat tercapai ketika mampu melakukan aksi pemblokiran pabrik semen.

Dari tiga penelitian terdahulu, dapat dilihat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas berkaitan dengan gerakan sosial masyarakat. Ketiga penelitian ini juga membahas terkait tentang perlunya adanya aksi yang di buat oleh kalangan masyarakat agar tercapainya tujuan. Dalam hal ini tujuannya ialah tentang penolakan yang dilakukan dengan aksi gerakan masyarakat yang menolak kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Kebijakan ini di buat atas dasar kepentingan segelintir kelompok saja.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah penelitian yang *pertama* membahas tentang gerakan penolakan Ranperda Ketenagakerjaan 2011 yang dilakukan oleh serikat buruh dengan alasan bahwa kebijakan yang dibuat dinilai merugikan kaum buruh. Penelitian *kedua* berfokus pada gerakan perubahan kebijakan terkait dengan rencana kenaikan BBM, yang dilakukan oleh mahasiswa agar rencana kebijakan kenaikan harga BBM tidak terlaksana. Selanjutnya penelitian *ketiga* mengkaji atau ingin melihat gerakan sosial masyarakat yang menolak pembangunan pabrik semen yang dilakukan oleh masyarakat secara sparatis dengan sasaran kaum pemilik modal. Jadi terlihat jelas bahwa perbedaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan ketiga penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan kepada pola gerakan masyarakat terkait dengan penolakan PIP yang berada di Desa Belo Laut. Selanjutnya peneliti ingin

melihat faktor apa saja yang mempengaruhi pola gerakan penolakan PIP di kawasan perairan pantai setempat.

F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan Teori Anthony Oberschall (Mobilisasi Sumber Daya). Perspektif Anthony Oberschall mengenai gerakan sosial terjadi melalui adanya ketegangan sosial maupun masyarakat yang mengalami keterasingan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor disini lebih merujuk pada kerugian yang dialami oleh masyarakat terkait ketersediaan sumber daya alam. Pemanfaatan dalam mengelola sumber daya alam harus mempunyai aturan yang jelas. Pengeksploitasian sumber daya alam sendiri seharusnya dapat dikelola dengan aturan dan prosedur yang jelas. Apabila adanya ketimpangan dalam pengambilan sumber daya alam ataupun hanya menguntungkan dari sisi sebelah pihak maka akan memicu terjadinya protes dari masyarakat. Protes yang terjadi di latar belakang oleh ketimpangan sosial yang melahirkan suatu bentuk gerakan sosial. Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar pemanfaatan sumber daya alam.

Ada tiga elemen utama dalam solusi mobilisasi sumber daya yaitu pertama, merevisi konsep pelaku (aktor) dari pandangan utilitarianisme menjadi pandangan bahwa aktor melekat secara sosial. Kedua, memperluas peranan penting mobilisasi mikro (jaringan informal) dalam interaksi suatu kelompok. Ketiga, spesifikasi makna yang membangkitkan semangat solidaritas dalam suatu

kelompok. Struktur mobilisasi sumber daya menunjuk pada jaringan antar aktor atau kelompok sosial sehingga membentuk suatu organisasi formal.

Menurut Anthony Oberschall dalam Sukmana (2013) mobilisasi sumber daya fokus perhatiannya suatu kegiatan masyarakat yang akan menunjang keberhasilan gerakan sosial. Keberhasilan gerakan sosial tentu harus menempuh langkah-langkah demi tercapainya tujuan kolektif. Langkah-langkah yang dimaksud ialah harus adanya rasa solidaritas yang kuat dalam suatu kelompok. Teori ini juga mengatakan bahwa gerakan sosial muncul karena tersedianya faktor-faktor pendukung, seperti dukungan dari kelompok koalisi. Adanya tekanan dan upaya pengorganisasian yang efektif serta sumber daya merupakan aspek penting bagi gerakan sosial. Peran pemimpin dalam melakukan gerakan sosial dapat menentukan kesuksesan dalam sebuah gerakan. Dalam mobilisasi sumber daya bahwa gerakan sosial menggunakan penalaran yang instrumental, perhitungan biaya dan manfaat, serta mengejar tujuan kepentingan secara rasional. Selain itu, gerakan sosial bukan sebuah kejadian yang abnormal yang terjadi pada masyarakat, tetapi di anggap perilaku normal terjadi di kalangan yang memiliki potensi konflik.

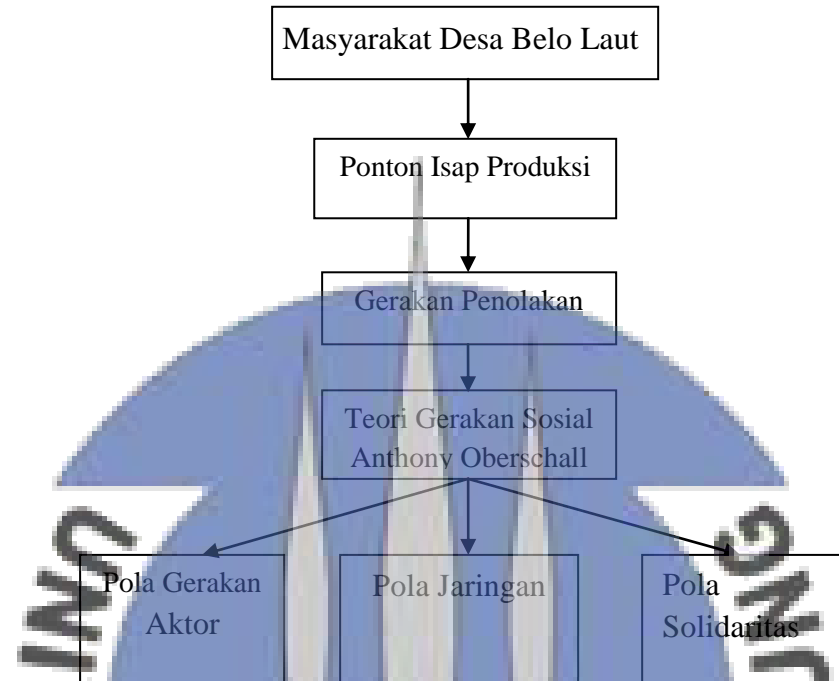
Mobilisasi yang diartikan oleh Oberschall ialah proses pengumpulan sumber daya seperti keanggotaan individu dalam suatu kelompok untuk bersatu dan berkomitmen demi memperoleh tujuan bersama, mempertahankan kepentingan kelompok, dan menentang keberadaan struktur dominasi. Artinya bahwa mobilisasi berarti proses pembentukan struktur gerakan, baik untuk menyiapkan strategi maupun protes terhadap aktor yang membutuhkan sumber daya seperti

individu, pengetahuan, untuk mendistribusikan informasi kepada masyarakat lainnya. Mobilisasi terbagi menjadi dua jenis yaitu mobilisasi konsensus dan mobilisasi aksi. Mobilisasi konsensus berarti usaha untuk membangkitkan semangat dukungan dan proses yang harus dilalui gerakan sosial untuk mendapatkan tujuan bersama sedangkan mobilisasi aksi yaitu usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan gerakan sosial, seperti keterampilan masyarakat setempat dan waktu untuk melakukan gerakan sosial. Mobilisasi konsensus akan tercapai jika siap untuk berpartisipasi di dalam segala bentuk gerakan agar tercapainya tujuan kolektif dan mobilisasi aksi yang berhasil jika mampu mengubah sebagian besar simpatisan menjadi partisipan yang aktif melakukan gerakan sosial. Istilah mobilisasi muncul atas adanya kelompok masyarakat yang bertujuan mencapai tujuan bersama. Teori mobilisasi sumber daya melihat faktor ekonomi masyarakat Serta dibentuk tidak didasarkan atas asumsi bahwa terdapat motivasi individu ketika bergabung dalam suatu gerakan, dan adanya keterasingan individu adalah dianggap tidak relevan.

Teori mobilisasi sumber daya berpendapat bahwa apabila masyarakat merasa adanya kebijakan yang membuat ketimpangan atau keresahan yang terjadi akan memungkinkan terjadinya gerakan sosial dari masyarakat. Teori mobilisasi sumber daya menekankan pada kondisi struktural serta pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya ini dilakukan secara bersama dalam jaringan sosial atau komunitas dalam masyarakat.

G. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir yang telah dirumuskan, yaitu :



Berdasarkan alur pikir di atas, permasalahan terjadi pada masyarakat Desa Belo Laut berkaitan dengan beroperasinya PIP di perairan pantai setempat. Masuknya PIP menimbulkan polemik dilingkungan sekitar. Masyarakat menganggap dengan hadirnya PIP menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Keresahan yang dirasakan oleh masyarakat membuat terjadinya gerakan penolakan PIP di Desa Belo Laut.

Kemudian untuk menganalisis gerakan penolakan PIP di lingkungan masyarakat, dilakukan dengan menggunakan teori Anthony Oberschall yang berkaitan dengan mobilisasi sumber daya. Hal ini untuk menjelaskan bagaimana pola gerakan penolakan dalam mobilisasi sumber daya terkait penolakan PIP di Desa Belo Laut.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini sendiri dimulai dengan studi literatur yang berkaitan dengan gerakan sosial pada umumnya, baik itu penelitian yang dilakukan sebelumnya ataupun wacana yang berkaitan dengan gerakan sosial. Selain itu dilakukan diskusi dan observasi untuk melengkapi gambaran proses, ataupun bentuk gerakan sosial yang disebabkan oleh PIP.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selain itu pula, dikemukakan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, dan kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

Bab kedua terdiri dari metode penelitian. Pada bab metode penelitian sendiri akan diuraikan langkah seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, dan objek penelitian. Selain itu juga akan dikemukakan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab ketiga akan membahas gambaran umum objek penelitian. Pada bab ini digambarkan sejarah desa dan kondisi geografis. Selanjutnya akan membahas mengenai kondisi demografis yaitu berkaitan dengan jumlah penduduk, sistem mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan jumlah perkembangan penduduk.

Bab keempat merupakan hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas secara rinci hasil penelitian. Pertama, bentuk gerakan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap keberadaan PIP. Kedua, faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan gerakan sosial.

Bab kelima merupakan penutup. Pada bab penutup akan membahas kesimpulan, implikasi teoritis, dan saran.

